

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian. 2002. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Edisi Pertama, Penerbit BPFE UGM, dan Pusat Pengembangan Akuntansi. UGM.
- Brahmantio, 2002. Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah. Studi kasus Sektor Pendidikan di Kota Surakarta)
- Darwanto, Yustikasari 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. UNHAS. Makasar
- Elita, D, 2002. Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, FISIP UNSU : Jurnal Otonomi Daerah.
- Erlis. 2014. “ Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Dengan Pendapatan Asli daerah Dan Dana Alokasi Umum Sebagai Variabel Moderasi”. *Jurnal Akuntansi*. Sumatra : Universitas Bung Hatta.
- Ghozali, I, 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 23. Semarang ; Badan Penerbit UNDIP.
- Halim, 2006. Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64.
- Kaho, Y, R. 1985 Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Jakarta ; Bina Aksara .
- Lin, J, Yifu dan Z. Liu. 2000. Fiscal Decentralization and Economic Growth in China, Economic Development and Cultural Change Chicago.
- Maimunah, M, 2006. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra, SNA IX, Padang 23-26 Agustus .
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maulida P., 2007. Pengaruh DAU dan PAD terhadap prediksi Belanja Daerah.
- Maulida P., 2007. Pengaruh DAU dan PAD terhadap prediksi Belanja Daerah
- Prakosa, K. B., Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (studi empirik di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY), JAAI, Vol. 8 No. 2, 2004

- Prakosa, K. B., Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (studi empirik di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY), JAAI, Vol. 8 No. 2, 2004.
- Samuels, D. 2000. Fiscal horizontal accountability? Toward theory of budgetary “checks and balances” in presidential systems. University of Minnesota, working paper presented at the Conference on Horizontal Accountability in New Democracies, University of Notre Dame, May.
- Saragih, J., Panglima. 2003. desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Penerbit Ghalia Indonesia
- Sidik, M, R Mahi, R Simanjuntak dan B. Brodjonegoro. 2002. Dana Alokasi Umum : Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah. Jakarta ;Penerbit Buku Kompas.
- Sundatoko. 2003. Dilema Otonomi Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Von Hagen, J. 2002. Fiscal rules, fiscal institutions, and fiscal performance. *The Economic and Social review* 33(3): 263-284.
- Widodo T. 2007. Flypapper Effect pada DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah pada Kab/kota di Bali.
- Wong, J. D. 2004. The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity, *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*.

<https://djpk.kemenkeu.go.id/> <https://lampung.bps.go.id/>